

ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA  
TENGAH TAHUN 2010-2016  
SKRIPSI



Oleh :

Nama : Tuter Rizki Wijiani

Nomor Mahasiswa : 14313138

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2010-2016

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Strata I

Jurusan Ilmu Ekonomi

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Tuter Rizki Wijiani

Nomor Mahasiswa : 14313138

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a green 6000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI KEPOL', '6000', and 'EKUWALENSI RUPIAH'.

Tuter Rizki Wijani

**PENGESAHAN**

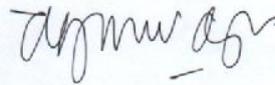
**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2010-2016**

Nama : Tuter Rizki Wijiani  
Nomor Mahasiswa : 14313138  
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 31 juli 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing



Agus Widarjono Drs., M.A., Ph.D.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2016**

Disusun Oleh : **TUTUR RIZKI WIJIAN**

Nomor Mahasiswa : **14313138**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 17 September 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Agus Widarjono, SE., MA., Ph.D

Penguji : Sarastri Mumpuni R, Dra., M.Si

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sryana, SE., M.Si, Ph.D.

## **HALAMAN MOTTO**

- Selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan adalah kunci dari segala kebahagiaan dan kesuksesan
- Jangan pernah menyerah saat kau gagal, dari kegagalanlah kita akan mendapatkan keberhasilan
- Tidak akan ada yang terjadi saat kau tidak melakukan apapun, namun keajaiban akan terjadi jika kamu melakukan sesuatu

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala curahan rahmat dan karuniaNya lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan secara khusus kepada :

### **Ayah Tercinta Wasimun dan Ibunda Tercinta Rasinah**

Atas segala kasih sayang dan cinta yang tulus, perjuangan, pengorbanan, perhatian dan doa yang tiada henti untuk penulis

serta adik-adik saya tercinta Nurul Syamsianah Imaniah, Rizki Fajriah, Faisal Ramadhana Pamungkas dan Habibah Khansa Zulfah dan seseorang yang selalu menemani teman-teman Harun ArRosyid, Agnesia Elsanti Putri, JaswarDhini,

Citra Sagita Dewi, Dea Ratu Permay, Pipit Fanintiyas

terimakasih atas segala dukungan semangat dan doa-doa yang tiada hentinya untuk saya dan tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2014 dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Terimakasih atas segala dukungan, semangat, dan doanya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016**”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk dan syafa’at kepada umat sehingga terlepas dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini dengan baik berkat doa, dukungan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. **Allah SWT.** yang telah memberikan rahmat dan ridhonya serta kesehatan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini
2. **Nabi Muhammad SAW** sebagai suru tauladan, dan panutan bagi umat manusia di dunia ini.
3. **Kedua Orang tua tercinta,** yang telah mendo’akan tanpa henti dan memberikan penulis semangat yang tidak pernah putus dalam mencari ilmu.
4. **Yth. Bapak Akhsyim Affandi, M.A** selaku Ka-Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

5. **Yth. Bapak Agus Widarjono Drs.,M.A.,Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang ditengah kesibukannya dengan sabar dan penuh perhatian membimbing serta memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi.
6. **Bapak dan Ibu Dosen**, yang telah menyampaikan ilmunya kepada penulis semasa perkuliahan, semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat dan berguna bagi penulis.
7. Segenap Staf Akademik, Staf Tata Usaha dan Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. **Yth. Bapak Anjar** yang banyak membantu dalam hal akademik.
9. Adik-adik ku yang selalu memberikan semangat untuk bisa terus menyelesaikan skripsi ini agar bisa segera berkumpul lagi dirumah
10. Sahabat-sahabat ku Harun, Agnes, Dhini, Citra, Pipit, Dea dan seluruh angkatan Ilmu Ekonomi 2014 terima kasih kalian telah memberikan kebahagiaan, keceriaan selalu menemani disaat susah maupun senang, terima kasih atas segala bantuan yang telah kalian berikan.
11. Untuk Harun ArRosyid yang selalu menemani dan memberikan semangat serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu, tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua.  
  
Penulis sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT, begitu pun dengan skripsi ini. Oleh karena itu penulis terbuka dan senang hati menerima kritik agar menjadi bahan

pembelajaran khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Dan harapan penulis skripsi ini dapat berguna bagi setiap pembaca.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xiv
HALAMAN DAFTAR GRAFIK.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK .....	xivvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>1.5 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Kajian Pustaka .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2 Landasan Teori.....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.2 Produk Domestik regional Bruto (PDRB).....</b>	<b>16</b>
<b>2.2.3 Jumlah Penduduk Miskin.....</b>	<b>18</b>
<b>2.2.4 Pengeluaran Pemerintah.....</b>	<b>20</b>
<b>2.2.4.1 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan.....</b>	<b>21</b>

2.2.4.2	Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan.....	21
2.2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka .....	22
2.3	Kerangka Pemikiran .....	23
2.3.1	Hubungan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	23
2.3.2	Hubungan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	23
2.3.3	Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	24
2.3.4	Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	24
2.3.5	Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	25
2.4	Hipotesis .....	25
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1	Jenis dan Sumber Pengumpulan Data .....	27
3.2	Definisi Operasional Variabel .....	28
3.4.1	Variabel Dependen (IPM).....	28
3.4.2	Variabel Independen .....	29
3.2.2.1	Variabel PDRB (X1).....	29
3.2.2.2	Variabel Jumlah Penduduk Miskin (X2).....	29
3.2.2.3	Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang kesehatan (X3).....	29
3.2.2.4	Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X4) .....	30
3.2.2.5	Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X5) .....	30
3.3	Metode Analisis .....	30
3.4	Estimasi Model Regresi Data Panel .....	32
3.4.1	<i>Common Effect Model</i> .....	32
3.4.2	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i> .....	32
3.4.3	<i>Random Effect Model</i> .....	33
3.5	Pemilihan Metode Estimasi .....	34
3.5.1	Uji F ( <i>Chow Test</i> ) .....	35
3.5.2	Uji Hausman .....	35

3.6 Uji Statistik .....	36
3.6.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	36
3.6.2 Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F).....	36
3.6.3 Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t).....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Deskripsi Data .....	38
4.2 Pemilihan Model.....	38
4.5.1 Uji Chow .....	38
4.5.2 Uji Hausman .....	39
4.5.3 Model Regresi Panel Fixed Effect .....	40
4.4 Pengujian Hipotesis.....	41
4.4.1 $R^2$ (Koefisien Determinasi).....	41
4.4.2 Hasil Uji F .....	42
4.4.3 Hasil Uji t.....	42
4.5 Analisis Ekonomi.....	46
4.5.1 Analisis Intercept.....	46
4.5.2 Analisis Hasil .....	47
4.5.2.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	47
4.5.2.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	48
4.5.2.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	48
4.5.2.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	49
4.5.2.5 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Implikasi .....	53

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data IPM Provinsi di Pulau Jawa 2010-2016.....	2
Tabel 1.2 PDRB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah).....	3
Tabel 1.3 Data Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah 2010-2016 (ribujiwa).....	5
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow Test.....	39
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman.....	39
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Fixed Effect</i> .....	40
Tabel 4.4 Hasil Koefisien Determinasi.....	43
Tabel 4.5 Hasil Uji F.....	44
Tabel 4.6 Estimasi Pengujian Hipotesis.....	45

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Intersept antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.....	47
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN I</b> Data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016.....	56
<b>LAMPIRAN II</b> Data PDRB atas dasar harga konstan 2010 (juta rupiah) 2010-2016.....	57
<b>LAMPIRAN III</b> Data Jumlah Penduduk Miskin 2010-2016.....	60
<b>LAMPIRAN IV</b> Data pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan 2010-2016.....	61
<b>LAMPIRAN V</b> Data pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 2010-2016....	62
<b>LAMPIRAN VI</b> Data Tingkat Pengangguran Terbuka 2010-2016.....	63
<b>LAMPIRAN VII</b> Tabel Common Effect.....	64
<b>LAMPIRAN VIII</b> Tabel Fixed Effect.....	65
<b>LAMPIRAN IX</b> Tabel Random Effect.....	66
<b>LAMPIRAN X</b> Tabel Uji Chow.....	67
<b>LAMPIRAN XI</b> Tabel Uji Hausman.....	68
<b>LAMPIRAN XII</b> Data Intercept per Kabupaten/Kota.....	69

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 sampai 2016. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia antara lain produk domestik regional bruto, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan tingkat pengangguran terbuka. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode regresi data panel menggunakan metode OLS (*Ordinary Last Square*) dengan bantuan *software Eviews 9*. Data panel merupakan penggabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Hasil dari regresi data panel menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa produk domestik regional bruto, jumlah penduduk miskin, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka tidak signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

**Kata Kunci** : IPM, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Penegluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, dan Tingkat PengangguranTerbuka.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu proses untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tujuan pembangunan adalah menciptakan lingkungan masyarakat yang memiliki kehidupan yang produktif, keberhasilan pembangunan bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan kualitas pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan kepada penduduk dengan upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan dasar manusia agar dapat berpartisipasi dalam bidang pembangunan.. indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat 13 dari 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2016. (BPS, 2018).

Pembangunan merupakan sebuah upaya atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Proses pembangunan meliputi berbagai perubahan diberbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara. Komponen dasar atau nilai inti keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*), dan kebebasan (*freedom*), yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap masyarakat.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar suatu pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi, oleh karena itu manusia merupakan asset bangsa yang sesungguhnya. Indeks pembangunan manusia dihitung berdasarkan empat komponen yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya sekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai penekatan pendapatan (BPS, 2017). Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan selama 7 tahun terakhir dihitung mulai tahun 2010 sebesar 66.08% dan terus meningkat sampai tahun 2016 mencapai 69.98%. berikut tabel IPM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1 :

**Tabel 1.1.**  
**Data IPM Provinsi di Pulau Jawa 2010-2016**

URUTAN	PROVINSI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	DKI JAKARTA	76.31	79.98	77.53	78.08	78.39	78.99	79.60
2	DIY	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59	78.38
3	BANTEN	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27	70.96
4	JAWA BARAT	66.15	66.67	67.32	68.25	68.80	69.50	70.05
5	JAWA TENGAH	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49	69.98

*Sumber : BPS, 2018*

Banyak faktor yang mempengaruhi perolehan angka IPM disuatu daerah. Selain faktor pendistribusian pendapatan terdapat salah satu faktor lain yang mempengaruhi IPM adalah pendapatan yang bisa dihasilkan oleh suatu daerah itu sendiri.

Tabel 1.2.

## PDRB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah)

Wilayah Jateng	PDRB						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>	623,224,621.33	658,003,645.36	690,461,017.10	726,652,111.09	763,219,714.00	805,043,118.61	848,553,195.24
Kabupaten Cilacap	75,099,089.89	78,156,818.82	79,702,237.61	81,022,670.26	83,391,500.18	88,347,606.68	92,820,362.20
Kabupaten Banyumas	23,016,943.39	24,538,595.63	25,982,158.22	27,793,138.47	29,367,687.40	31,164,876.40	33,051,046.65
Kabupaten Purbalingga	10,858,631.52	11,474,221.22	12,138,445.34	12,778,311.23	13,397,712.78	14,125,812.26	14,796,924.63
Kabupaten Banjarnegara	9,439,359.00	9,952,403.66	10,473,363.43	11,043,083.01	11,629,845.85	12,266,046.35	12,929,657.38
Kabupaten Kebumen	12,311,421.83	13,068,985.50	13,707,057.24	14,333,333.50	15,163,091.84	16,115,554.01	16,916,219.56
Kabupaten Purworejo	8,513,490.56	8,993,814.30	9,406,242.93	9,870,969.95	10,312,937.79	10,866,645.98	11,426,355.14
Kabupaten Wonosobo	9,005,925.54	9,489,550.46	9,935,905.32	10,333,757.05	10,828,168.68	11,353,869.94	11,949,926.14
Kabupaten Magelang	14,363,230.57	15,323,039.48	16,071,142.55	17,020,755.61	17,936,288.38	18,838,351.97	19,855,844.24
Kabupaten Boyolali	13,721,701.47	14,592,026.26	15,369,974.36	16,266,498.68	17,148,350.76	18,160,983.95	19,118,756.30
Kabupaten Klaten	17,002,049.66	18,071,350.51	19,102,402.71	20,241,429.01	21,424,522.36	22,558,976.15	23,717,931.02
Kabupaten Sukoharjo	16,357,221.65	17,319,638.62	18,342,247.26	19,401,889.44	20,449,009.84	21,612,078.19	22,836,644.07
Kabupaten Wonogiri	13,310,571.10	13,786,711.34	14,605,088.22	15,303,280.47	16,107,795.17	16,977,198.56	17,862,651.97
Kabupaten Karanganyar	16,393,788.72	17,205,063.88	18,219,456.66	19,256,516.28	20,262,444.42	21,286,287.14	22,428,803.80
Kabupaten Sragen	15,832,557.66	16,870,231.27	17,902,104.86	19,102,181.74	20,169,824.79	21,390,871.20	22,614,621.66
Kabupaten Grobogan	12,766,021.74	13,172,711.96	13,842,047.14	14,474,728.93	15,064,456.66	15,962,619.43	16,674,629.70
Kabupaten Blora	10,149,079.63	10,597,723.01	11,116,865.90	11,712,504.85	12,227,201.29	12,882,587.70	15,913,432.03
Kabupaten Rembang	8,373,546.87	8,808,302.78	9,277,163.23	9,780,750.39	10,284,274.36	10,850,269.20	11,418,008.73
Kabupaten Pati	18,782,546.64	19,893,325.24	21,072,328.70	22,329,693.98	23,365,213.99	24,752,325.07	26,039,955.34
Kabupaten Kudus	52,933,496.31	55,175,794.89	57,440,810.51	59,944,556.52	62,600,680.87	65,041,047.55	66,688,490.99
Kabupaten Jejara	13,347,321.26	14,004,325.03	14,824,995.87	15,623,738.87	16,374,715.21	17,200,365.92	18,063,134.88
Kabupaten Demak	11,647,735.65	12,275,702.69	12,823,227.04	13,499,226.47	14,078,419.80	14,913,837.51	15,665,204.77
Kabupaten Semarang	21,572,136.87	22,925,456.80	24,306,718.35	25,758,121.08	27,264,112.96	28,769,677.95	30,286,380.79
Kabupaten Temanggung	9,710,199.27	10,301,569.79	10,740,983.02	11,299,342.97	11,867,679.59	12,486,494.54	13,110,795.64

Kabupaten Kendal	18,798,278.37	20,032,434.32	21,075,717.33	22,386,123.50	23,536,834.39	24,771,543.49	26,159,087.07
Kabupaten Batang	9,447,328.38	10,025,044.65	10,488,456.63	11,104,696.78	11,693,897.06	12,327,739.23	12,935,491.09
Kabupaten Pekalongan	10,254,315.35	10,834,201.09	11,354,849.90	12,034,805.89	12,630,368.83	13,234,564.04	13,917,701.83
Kabupaten Pemalang	11,282,196.10	11,847,199.06	12,477,235.25	13,172,063.61	13,898,669.42	14,673,696.23	15,463,800.55
Kabupaten Tegal	15,106,509.91	16,071,820.41	16,912,249.74	18,050,291.97	18,958,841.04	19,992,675.45	21,265,717.23
Kabupaten Brebes	20,158,107.77	21,498,422.48	22,482,262.67	23,812,056.92	25,074,171.51	26,572,834.89	27,867,371.33
Kota Magelang	4,010,718.18	4,255,662.21	4,484,268.08	4,755,092.20	4,992,112.82	5,247,341.27	5,518,684.53
Kota Surakarta	21,469,551.30	22,848,439.42	24,123,781.59	25,631,681.32	26,984,358.61	28,453,493.87	29,966,373.01
Kota Salatiga	5,845,475.81	6,230,219.49	6,574,907.26	6,989,045.50	7,378,042.82	7,759,181.62	8,164,810.21
Kota Semarang	80,824,099.97	86,142,966.70	91,282,029.07	96,985,402.04	103,109,874.91	109,088,689.61	115,298,166.86
Kota Pekalongan	4,624,260.08	4,878,332.22	5,151,813.52	5,456,196.88	5,755,282.26	6,043,095.73	6,367,272.96
Kota Tegal	6,895,713.33	7,341,540.16	7,650,479.56	8,084,175.73	8,491,325.37	8,953,879.56	9,442,940.97

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018

Pada Tabel 1.2. menunjukkan peningkatan PDRB selama 7 tahun terakhir terhitung mulai tahun 2010, PDRB tahun 2010 sebesar 623,224 juta rupiah dan terus meningkat sampai tahun 2016 PDRB mencapai 848,553 juta rupiah.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah karena pembangunan manusia berarti mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan. Jumlah penduduk miskin yang terus meningkat akan mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara, namun jika jumlah penduduk miskin di suatu negara semakin menurun maka akan membantu meningkatkan pembangunan ekonomi

menjadi baik. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 5217.2 ribu jiwa dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2016 sebesar 4506.89 ribu jiwa. Bagi penduduk miskin peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan cara memberikan keterampilan dan menumbuhkan sikap produktif dalam mendorong semangat kemandirian bersama agar dapat terlepas dari kemiskinan. Berikut adalah tabel jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dapat dilihat dari Tabel 1.3.

**Tabel 1.3.**

**Data Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah 2010-2016  
(ribujiwa)**

WILAYAH JATENG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PROVINSI JAWA TENGAH	5217.2	5256	4863.5	4811.3	4561.82	4577	4506.89
Kabupaten Cilacap	297.2	282	260.9	255.7	239.8	243.5	240.2
Kabupaten Banyumas	314.1	328.5	303.9	296.8	283.5	285.9	283.9
Kabupaten Purbalingga	208.9	196	181.3	181.1	176	176.5	171.8
Kabupaten Banjarnegara	166.7	177.3	164	166.8	159.5	165.4	158.2
Kabupaten Kebumen	263	279.4	258.5	251.1	242.3	241.9	235.9
Kabupaten Purworejo	115.3	121.9	112.8	109	102.1	101.2	99.1
Kabupaten Wonosobo	174.7	183	169.3	170.1	165.8	166.4	160.1
Kabupaten Magelang	167.2	179.6	166.2	171	160.5	162.4	158.9
Kabupaten Boyolali	127.8	139.5	129.1	126.5	118.6	120	117
Kabupaten Klaten	197.4	203.1	187.9	179.5	168.2	172.3	168
Kabupaten Sukoharjo	90.2	92	85.1	84.1	78.9	79.9	78.9
Kabupaten Wonogiri	145.5	146.4	135.4	132.2	123.8	123	124.8
Kabupaten Karanganyar	113.8	124.5	115.2	114.4	107.3	106.4	107.7
Kabupaten Sragen	149.7	154.3	142.8	139	130.3	130.4	126.8
Kabupaten Grobogan	233.7	227.8	210.8	199	186.5	184.5	184.1
Kabupaten Blora	134.9	134.9	124.8	123.8	116	115	113.9
Kabupaten Rembang	138.5	140.4	129.9	128	120	119.1	115.5
Kabupaten Pati	172.4	175.1	162	157.9	148.1	147.1	144.2
Kabupaten Kudus	70.2	73.6	68.1	70.1	65.8	64.1	64.2
Kabupaten Jepara	111.8	113.3	104.8	106.9	100.5	100.6	100.3
Kabupaten Demak	198.8	192.5	178.1	172.5	162	160.9	158.8

Kabupaten Semarang	97.9	96	88.8	83.2	79.8	81.2	80.7
Kabupaten Temanggung	95.3	94.9	87.8	91.1	85.5	87.5	87.1
Kabupaten Kendal	130.4	128.6	119	117.7	110.5	109.3	107.8
Kabupaten Batang	103.6	95.3	88.2	87.5	82.1	83.5	82.6
Kabupaten Pekalongan	136.6	125.9	116.5	116.5	109.3	112.1	113.3
Kabupaten Pemalang	251.8	261.2	241.7	246.8	237	235.5	227.1
Kabupaten Tegal	182.5	161.1	149	149.8	140.3	143.5	144.2
Kabupaten Brebes	398.7	394.4	364.9	367.9	355.1	352	348
Kota Magelang	12.4	13.1	12.1	11.8	11	10.9	10.6
Kota Surakarta	69.8	64.5	59.7	59.7	55.9	55.7	55.9
Kota Salatiga	14.2	13.3	12.3	11.5	10.8	10.6	9.7
Kota Semarang	79.7	88.5	81.9	86.7	84.7	84.3	83.6
Kota Pekalongan	26.4	28.3	26.8	24.1	23.6	24.1	23.6
Kota Tegal	25.7	25.9	24	21.6	20.9	20.3	20.3

*Sumber: BPS Provinsi Jateng, 2018*

Dari uraian diatas serta pemikiran yang telah di jelaskan, maka penulis merasa terdorong untuk mendalami dan meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2016”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh antara Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB) dengan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk Miskin dengan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

4. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
5. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
6. Diduga secara bersama-sama variabel Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis hubungan antara PDRB dengan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis hubungan antara Jumlah Penduduk Miskin dengan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

5. Menganalisis hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Diduga secara bersama-sama variabel Produk domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai referensi bagi pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah agar dapat mengambil kebijakan yang tepat di masa yang akan datang berkaitan dengan Indeks pembangunan Manusia.

Dapat memberika informasi dan penambahan wawasan bagi pihak-pihak terkait serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini secara sistematis memiliki susunan Bab yang terdiri dari Pendahuluan, Kajian Pustaka, dan Landasan Teori, Metode penelitian, Hasil dan Pembahasan, Penutup. Bagaimana akan dijelaskan dibawah ini:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pertama bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Kedua bab ini berisi kajian pustaka dimana akan banyak membahas penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema yang masih saling berkaitan, selanjutnya landasan teori dimana melakukan penguraian teori-teori, dan hipotesis menjelaskan dugaan awal peneliti pada hubungan teori-teori yang akan diteliti.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Ketiga bab ini berisi mengenai jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, dan penjelasan mengenai penggunaan metode-metode alat analisi yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Keempat bab ini berbicara tentang deskriptif obyek penelitian, temuan hasil analisis dan menjelaskan estimasi dengan penjabaran intepretasi hasil.

## **BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Kelima bab ini berisi tentang kesimpulan dimana rangkuman dari hasil analisis yang telah dilakukan. Di bab ini dapat diketahui kesesuaian untuk menyesuaikan antara hipotesis awal dengan hasil analisis untuk melihat apa teori yang digunakan terdapat persamaan atau sudah mengalami perubahan. Pada bab ini juga terdapat saran yang ditujukan untuk pembaca.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Pada penelitian ini juga mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk menyusun arah penelitian ini. Ada beberapa penelitian berikut yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Septiana (2015), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara”. Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diteliti mulai bulan Mei sampai dengan Juli 2014. Alat analisis menggunakan regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sulawesi Utara. Sehingga IPM di provinsi Sumatra Utara selalu mengalami peningkatan pada setiap bulannya. Pada variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan ternyata masih belum bisa membantu pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia.

Asri, dkk (2013) melakukan sebuah penelitian dengan judul “bagaimana pengeluaran pemerintah Khususnya sektor pendidikan dan kesehatan emmpengaruhi Indeks pembangunan Manusia (IPM)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia

(IPM). Penelitian ini dilakukan di Indonesia dari tahun 1996-2008, yaitu 13 tahun. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh badan pusat statistik (BPS) dan lembaga lainnya yaitu tentang indeks pembangunan manusia indonesia. Data Indeks Pembangunan Manusia termasuk data time series. Variabelnya terdiri dari variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia, dan variabel independennya adalah Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tidak signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

Sugiarto A, dkk (2013), dalam penelitian yang dilakukan dengan judul “ analisis pengaruh pengeluaran pemerintah kabupaten/kota sektor kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh”. Penelitian ini dikonsentrasikan terhadap realisasi pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan. Penelitian ini dilakukan diseluruh kabupaten/kota di Aceh kecuali 5 kabupaten/kota yaitu, Kab Aceh Jaya, Kab Pidie Jaya, kota Langsa, kota Subang, kota Subulussalam. Data penelitian ini merupakan sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Aceh dan Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP). Data penelitian ini berupa Time Series dari tahun 2005-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan secara bersama-sama signifikan dalam meningkatkan IPM. Akan tetapi jika pada uji individu diketahui

bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak signifikan dan bernilai koefisien negatif. Jadi pada kasus penelitian ini bahwa hal ini diakibatkan oleh pengalokasian yang tidak tepat dalam penggunaan alokasi dana yang lebih banyak melihat pembangunan secara fisik dan kurang melihat kualitas dan mutu pendidikan.

Dewi (2017) melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari BPS data instansi yang terkait dengan penelitian ini. jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data cross section. Variabel independen dalam penelitian ini kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau pada tahun 2014.

Metode analisis yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan fasilitas program SPSS versi 20.0 (*Statistic Package for Social Sciences*). Hasil dari penelitian ini adalah kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Riau. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.

Septian Jefri, dkk (2015), melakukan penelitian yang diuji dari studi kasus oleh karesidenan Besuki yang berjudul “Pengaruh PDRB, Belanja Modal dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. Pengamatan pada penelitian ini menggunakan data panel, data yang diteliti data sekunder dari tahun 2004 sampai 2013 meliputi di daerah Eks Karesidenan yaitu, empat kabupaten di Jawa Timur, yaitu kab. Banyuwangi, kab. Jember, kab. Wonosobo, kab. Situbondo. Variabel yang diamati yaitu Jumlah Kemiskinan, PDRB, Realisasi Belanja Modal. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB signifikan dan berpengaruh positif. Jadi apabila PDRB meningkat pada daerah penelitian ini masing-masing Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten mengalami peningkatan. Begitu juga dengan variabel belanja modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di daerah Eks Karesidenan. Jadi apabila alokasi untuk belanja modal ditingkatkan maka akan meningkatkan IPM di masing-masing daerah Eks Karesidenan.

Chalid, N & Yusuf, Y (2014) melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau”. Penelitian ini menggunakan data sekunder, adapun variabel dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, UMK, laju pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negative terhadap IPM. Sedangkan upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap

IPM. Variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap indeks pembangunan manusia adalah laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi harus dimaksimalkan agar nilai indeks pembangunan manusia terus meningkat.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan penelitian ini terletak pada lokasi, tahun, serta variabel-variabel independennya. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sampai dengan 2016 dengan variabel-variabel independen yaitu; PDRB perkapita, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan tingkat pengangguran terbuka dengan menggunakan metode analisis data panel.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pengukuran indeks pembangunan manusia mengukur capaian pembangunan dengan basis sejumlah komponen dasar dari kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan (Todaro, 2009). Dari ketiga dimensi dalam indikator IPM, masing-masing memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, maka digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan dua data yaitu

indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Untuk dimensi standar hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi sejumlah barang kebutuhan pokok atau biasa disebut paritas daya beli. Berikut adalah komposisi dari tiga dimensi dasar yang membentuk indkes pembangunan manusia:

#### 1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah sebuah perkiraan rata-rata pada tahun yang dapat dicapai seseorang pada usia waktu tertentu selama dia hidup. Dalam perhitungan angka harapan hidup digunakan dua jenis data yaitu Anak Lahir Hidup dan Anak Masih Hidup. Jadi angka harapan hidup ini memperhitungkan bagaimana kesempatan seorang anak untuk tetap hidup sampai waktu usia yang ditempuh selama hidupnya.

Adapun standar yang sudah ditetapkan oleh UNDP (*United Nations Development Programe*) dalam menghitung standar angka harapan hidup pada suatu negara. Batas maksimum dan minimum tersebut angka tertinggi yang ditetapkan pada usia 85 tahun, sedangkan pada batas terendah ditetapkan pada usia 25 tahun.

#### 2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah presentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Sesuai dengan standar yang ditetapkan UNDP angka melek huruf memiliki batas maksimum 100 dan 0 pada batas minimum, hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua

masyarakat mampu untuk membaca dan menulis huruf latin dan begitu sebaliknya pada kondisi minimum.

### 3. Rata- rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah dalam perhitunagn IPM menggambarkan seseorang dalam jumlah tahun berusia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Untuk rata-rata lama sekolah memiliki standar batas maksimum dan minimum sesuai SDNP batas atas sebesar 15 tahun dan batas bawah sebesar 0 tahun. Pada usia 15 tahun ini mengenyam pendidikan formal.

#### **2.2.2 Produk Domestik regional Bruto (PDRB)**

Produk domestik regional bruto (PDRB) dimana merupakan jumlah niali barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada daerah tertentu. Jadi PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di dala suatu daerah baik itu berupa barang maupun jasa. PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam mengetahui suatu kondisi ekonomi disuatu daerah biasanya dalam bentuk tahunan. PDRB ada dua bentuk yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. sedangkan, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari

tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Dalam perhitungan PDRB secara konseptual menggunakan 3 macam pendekatan.

1. Pendekatan Produksi; Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)
2. Pendekatan Pengeluaran; Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).
3. Pendekatan Pendapatan; Produk domestik regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan.

Cakupan PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan menjadi Sembilan sektor ekonomi yaitu:

1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan Perikanan
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan

4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
5. Sektor Konstruksi
6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
8. Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
9. Sektor Jasa-jasa

Sedangkan PDRB perkapita bisa disebut cerminan langsung dari keadaan ekonomi masyarakat secara makro. PDRB perkapita dapat menggambarkan rata-rata pendapatan yang diperoleh masing-masing penduduk selama satu tahun. PDRB perkapita merupakan nilai hasil penjumlahan PDRB yang dibagi dengan total keseluruhan penduduk pertengahan tahun dalam daerah tersebut. penulisan perhitungan PDRB perkapita secara sistematis:

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{\sum \text{penduduk}}{PDRB} \times 100\%$$

### **2.2.3 Jumlah Penduduk Miskin**

Penduduk miskin ialah, dimana seseorang yang masuk kedalam kategori miskin yaitu tidak berharta benda dan serba kekurangan. Jumlah penduduk yang masuk kedalam kategori penduduk miskin biasanya banyak terdapat di kota-kota besar di seluruh dunia. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. jadi penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan bidang kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh kementerian bidang kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Kemiskinan menurut *World Bank* (2004) merupakan keadaan dimana seseorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya. Standar rasio tingkat kemiskinan yang ditetapkan oleh World Bank sebesar \$2/day atau sekitar Rp 22,000.00/hari.

Menurut Suryawati (2005) yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah konsumsi rupiah berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari. Patokan tersebut berlaku untuk semua jenis kelamin, umur, fisik, berat badan. Menurut sayogyo, tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah (rupiah) yang dikeluarkan dalam bentuk konsumsi dan

dalam bentuk kilogram (kg) beras per orang per tahun dan dibagi dalam wilayah pedesaan dan perkotaan. Di daerah pedesaan, jika;

Miskin, jika pengeluaran rumah tangga kurang dari 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

- a. Miskin sekali, jika pengeluaran rumah tangga kurang dari 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- b. Paling miskin, jika pengeluaran rumah tangga kurang dari 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Di daerah perkotaan;

- a. Miskin, jika pengeluaran rumah tangga kurang dari 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- b. Miskin sekali, jika pengeluaran rumah tangga kurang dari 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- c. Paling miskin, jika pengeluaran rumah tangga kurang dari 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

#### **2.2.4 Pengeluaran Pemerintah**

Dalam studi ekonomi pembangunan mempelajari bahwa dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan tersedianya barang public. Pengeluaran pemerintah sendiri secara sederhana dapat diartikan pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai administrasi seperti gaji pegawai dan untuk kegiatan pembangunan seperti bantuan

pembangunan sosial, sistem pendidikan, prasarana kesehatan, dan pembiayaan pembangunan infrastruktur sebagai sarana percepatan pertumbuhan ekonomi.

#### **2.2.4.1 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan**

Kewajiban pemerintah daerah dalam peningkatan kesehatan penduduk diwilayah daerahnya sudah diatur oleh menteri dalam negeri yang menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”. Hal ini ditujukan bahwa kesehatan berpengaruh langsung dengan peningkatan dalam menjalankan kewajiban sebagai penyedia barang public, bagaimana pemerintah harus dapat menjamin kesehatan masyarakatnya dengan memberikan pelayanan kesehatan dengan kualitas baik, yang terjangkau, adil, dan merata.

#### **2.2.4.2 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan**

Pendidikan sering disebut sebagai investasi jangka panjang maksud dari hal ini adalah bagaimana pendidikan dapat meningkatkan kualitas seseorang dengan menambah tingkat pengetahuan akan hal tertentu baik bidang akademik atau non akademik. Pemerintah sebagai pengatur yang berkewajiban dalam menyediakan barang publik berupa kebutuhan dasar seperti pelayanan pendidikan. Seperti halnya yang sudah diatur dalam undang-undang tentang pendidikan. “dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi

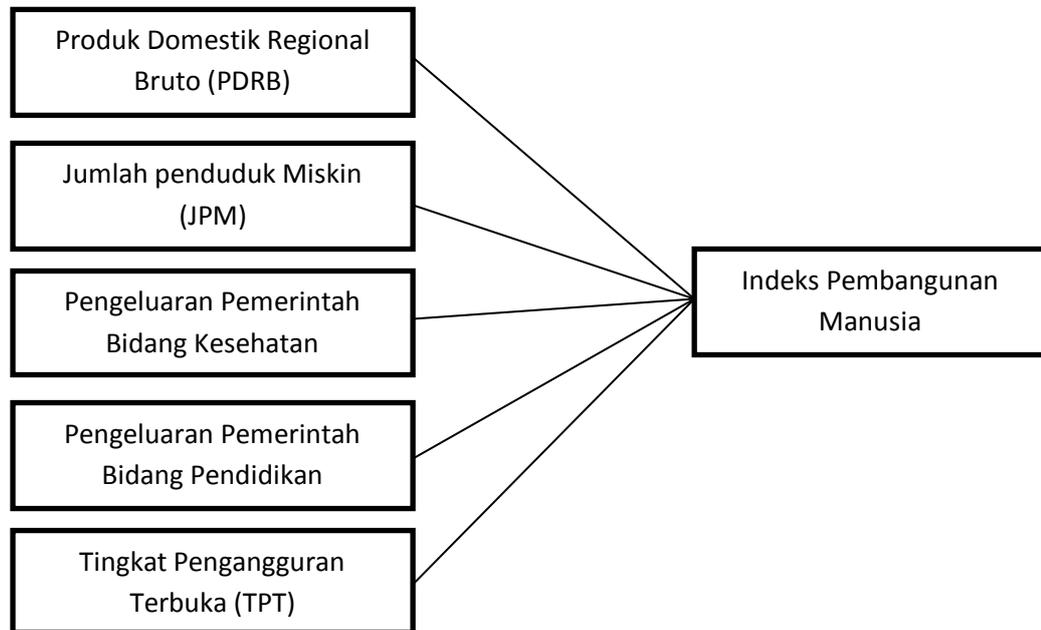
pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD”. Pada dasarnya pemerintah daerah lebih memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN ini lebih di peruntukkan bagi satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah sebagai salah satu cara menunjang kesuksesan program wajib belajar dua belas tahun, dimana untuk besaran anggaran dan bentuk penggunaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **2.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Jadi, apabila ada orang yang tidak bekerja, tetapi dia tidak aktif mencari pekerjaan, dia bisa dikatakan pengangguran. Lalu, pertanyaannya adalah apakah ada orang yang tidak bekerja tetapi tidak mencari pekerjaan. Dan jawabannya adalah Ada. Contohnya seperti ibu rumah tangga atau anak sekolah.

Ibu rumah tangga tidak bekerja untuk mencari penghasilan, akan tetapi mereka tidak aktif mencari pekerjaan. Demikian juga dengan anak sekolah, mereka tidak bekerja tetapi tidak aktif mencari pekerjaan. Namun, apabila mereka (ibu rumah tangga dan anak sekolah), aktif mencari pekerjaan, maka mereka bisa dikatakan sebagai pengangguran.

## 2.3 Kerangka Pemikiran



### 2.3.1 Hubungan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan PDRB perkapita akan meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan pendapatan yang diterimanya. Ketika tingkat pendapatan PDRB suatu daerah naik maka pendapatan masyarakat juga ikut naik, menyebabkan pengeluaran masyarakat untuk peningkatan pembangunan manusia dan menjadikan kualitas hidup meningkat.

### 2.3.2 Hubungan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Semakin banyak penduduk miskin berarti ketidakmampuan penduduk dalam suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhannya, namun sebaliknya jika penduduk miskin di suatu daerah tersebut sudah dapat berkembang, perkembangan ini menandakan bahwa pembangunan manusia di suatu daerah baik.

### **2.3.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Kesehatan merupakan sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia (Tjiptoherijanto,1989). Maka dari itu jika pada suatu daerah yang memiliki tingkat kesehatan masyarakatnya dibawah rata-rata hal ini akan menurunkan kualitas kerja sehingga banyak masyarakat untuk beristirahat dan tidak bekerja. Maka dari sisi ini diperlukannya anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah.

### **2.3.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Peran penting pendidikan sebagai peningkatan sumber daya manusia. Bagaimana pendidikan bisa meningkatkan ekonomi suatu negara, dikarenakan sumber daya manusia yang berpengetahuan, berketerampilan, dan semakin produktif. Maka banyak produk-produk inovasi dan berbasis teknologi terbaru sehingga efisien dan semakin dapat memenuhi permintaan pasar. Sebagai pendidikan harus diperoleh setiap lapisan masyarakat, diperlukannya peran pemerintah dalam hal ini. melalui pengeluaran pemerintah diharapkan banyak jumlah murid yang mampu menyelesaikan pendidikannya. Bagaimana sejalan dengan anggaran APBN yang disisihkan khusus untuk bidang pendidikan sebesar 20%, dengan harapan peningkatan pendidikan yang didapat oleh masyarakat agar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### **2.3.5 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Tingkat pengangguran terbuka berhubungan erat dengan pembangunan manusia, dimana semakin tinggi pengangguran menandakan penduduk di suatu daerah tersebut tidak produktif, namun sebaliknya semakin rendah angka pengangguran suatu daerah menandakan penduduk suatu daerah tersebut produktif, dan dapat di artikan pembangunan manusia baik ketika pengangguran rendah.

## **2.4 Hipotesis**

Hipotesis dimana dugaan awal berdasarkan kajian dan landasan teori maka hipotesis yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga PDRB berpengaruh Positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Diduga Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh Negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Diduga Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh Positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Diduga Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh Positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
5. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh Negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
6. Diduga secara bersama-sama variabel Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan,

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Tingkat Pengangguran  
Terbuka Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia  
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai publikasi lainnya, jurnal, serta dinas-dinas yang terkait dengan penelitian ini. data berbentuk *time series* dari tahun 2010-2016 dan *cross section* dengan objek 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen (PDRB, Jumlah penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka) berpengaruh terhadap variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia) dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Data Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016 dalam satuan persen.
2. Data PDRB menurut Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016 dalam satuan juta rupiah.
3. Data Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016 dalam satuan ribu jiwa.
4. Data Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016 dalam satuan Juta Rupiah (Rp).

5. Data Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016 dalam satuan Juta Rupiah (Rp).
6. Data Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016 dalam satuan persen.

### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Dalam melakukan penelitian memerlukan alat penguji agar data yang diperoleh dapat diolah menggunakan uji data sekunder yang bersumber dari laporan badan pusat statistic (BPS Jawa Tengah) pada tahun 2010-2016. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.4.1 Variabel Dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Variabel Indeks Pembangunan Manusia data yang digunakan untuk mengetahui standar ukuran yang digunakan melihat kualitas hidup masyarakat disuatu wilayah. Variabel IPM melihat seberapa tingkat kualitas masyarakat dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang atau pendapatan riil (Todaro,2009). Data variabel IPM yang digunakan pada keseluruhan 35 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai 2016. Ukuran satuan pada variabel IPM menggunakan persen (%).

### **3.4.2 Variabel Independen**

#### **3.2.2.1 Variabel PDRB (X1)**

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah penerimaan dari suatu daerah itu sendiri, atau kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu atas dasar biaya faktor. Data PDRB menurut harga konstan 2010 diambil dari tahun 2010-2016 yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah(Rp).

#### **3.2.2.2 Variabel Jumlah Penduduk Miskin (X2)**

Jumlah Penduduk merupakan keseluruhan penduduk yang tergolong miskin dan tinggal di wilayah tertentu dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) . kemiskinan menurut BPS (2018), kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Data diambil dari tahun 2010-2016 yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan Ribu Jiwa.

#### **3.2.2.3 Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang kesehatan (X3)**

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data anggaran penegeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan dalam

bentuk juta rupiah dari tahun 2010 hingga tahun 2016 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan Juta Rupiah.

#### **3.2.2.4 Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X4)**

Adalah bagaimana pendidikan dapat meningkatkan kualitas seseorang dengan menambah tingkat pengetahuan akan hal tertentu baik bidang akademik atau non akademik. Pemerintah sebagai paratur yang berkewajiban dalam menyediakan barang publik berupa kebutuhan dasar seperti pelayanan pendidikan. Seperti halnya yang telah diatur dalam undang-undang tentang pendidikan. Data variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang digunakan pada keseluruhan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016 yang dinyatakan dalam satuan JutaRupiah (Rp).

#### **3.2.2.5 Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X5)**

Menurut Sukirno (2004: 28), pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Data yang digunakan pada keseluruhan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah Tahun 2010-2016 yang dinyatakan dalam satuan persen.

### **3.3 Metode Analisis**

Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Metode dalam pengujian menggunakan analisis data kuantitatif dengan variabel dependen indeks pembangunan manusia dan variabel independen yang digunakan dalam estimasi adalah PDRB (juta rupiah), jumlah penduduk miskin (ribu jiwa), pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (milyar rupiah), pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (milyar rupiah), dan tingkat pengangguran terbuka (persen).

Analisis data panel adalah penggabungan antara data *cross section* dengan data *time series*. Data *time series* merupakan data yang berdasarkan kurun waktu tertentu. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang diambil pada waktu yang sama dari beberapa daerah. Dalam penggunaan regresi data panel hanya menggunakan satu persamaan regresi saja. Regresi data panel akan memberikan hasil analisis yang lebih baik secara statistik karena penggabungan data *cross section* dan runtun waktu akan menghasilkan derajat kebebasan yang lebih besar sehingga bisa mengatasi masalah penghilangan variabel (*omitted variabel*) (Sriyana,2014).

Untuk melakukan regresi pada variabel maka menggunakan tiga metode yaitu: *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Persamaan model regresi data panel dapat dirumuskan dalam model berikut:

$$IPM = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 JPM_{it} + \beta_3 PPBK_{it} + \beta_4 PPBP_{it} + \beta_5 TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

i = Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

t = Waktu (2010 hingga 2016)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_5$  = Koefisien

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto ( juta rupiah)

JPM = Jumlah Penduduk Miskin ( ribu jiwa)

PPBK = Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan ( milyar rupiah)

PPBP = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan ( milyar rupiah)

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka ( persen)

$\varepsilon$  = *Error Term*

### 3.4 Estimasi Model Regresi Data Panel

Menurut Sriyana (2014). Analisis regresi data panel memiliki prinsip menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Model data panel dapat di estimasi dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini memberikan jumlah data yang banyak sehingga bisa memenuhi persyaratan dan sifat-sifat statistic dengan beberapa estimasi.

#### 3.4.1 *Common Effect Model*

Metode *common effect* merupakan teknik sederhana untuk mengestimasi data panel, dengan cara menggabungkan data *time series* dan *cross section* tanpa melihat perbedaan waktu dan individu. Metode ini hanya menggunakan pendekatan kebenaran jika data yang digunakan meliputi beberapa unit dan memiliki periode waktu yang sedikit. (Sriyana, 2014).

Metode *common effect* menganggap bahwa intersep dan slope tetap baik antar waktu maupun antar individu. Adanya perbedaan intersep dan slope diasumsikan akan dijelaskan oleh variabel gangguan. Dengan model persamaan *common effect* sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 JPM_{it} + \beta_3 PPBK_{it} + \beta_4 PPBP_{it} + \beta_5 TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

#### 3.4.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Menurut Sriyana (2014). Model *Fixed Effect* merupakan model regresi yang menunjukkan perbedaan obyek dengan konstanta antar obyek. Dalam model ini ada asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar unit artinya intersep

suatu regresi sangat mungkin bisa berubah untuk setiap individu dan waktu. Metode ini dapat dilakukan dengan variabel semu (*dummy*) yang akan menjelaskan adanya perbedaan antar intersep dan model ini dapat di estimasi dengan menggunakan teknik *least square dummy variabel* (LADV).

$$IPM = \beta_0 + \beta_{1it} + \beta_{2it} + \beta_{3it} + \beta_{4it} + \beta_{5it} + \sum_{i=1}^{n=34} \alpha Di + \text{eit}$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

i = Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

t = Waktu (2010 hingga 2016)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_5$  = Koefisien

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto ( juta rupiah)

JPM = Jumlah Penduduk Miskin ( ribu jiwa)

PPBK = Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan ( milyar rupiah)

PPBP = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan ( milyar rupiah)

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka ( persen)

$\varepsilon$  = *Error Term*

### 3.4.3 *Random Effect Model*

Widarjono, A (2013), menjelaskan bahwa dimasukkannya variabel *dummy* ke dalam model *fixed effect* memiliki tujuan untuk mewakili kita tentang model yang sebenarnya. Namun berakibat pada berkurangnya derajat kebebasan yang menyebabkan efisiensi parameter tersebut menjadi berkurang. Masalah ini dapat diatasi dengan cara menggunakan variabel gangguan (*error term*) yang dikenal

dengan metode *random effect*. Kelebihan dari model *random effect* yaitu dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan tanpa mengurangi jumlahnya seperti yang digunakan pada model *fixed effect*, yang berarti hasil estimasi parameter akan semakin efisien.

$$IPM = (\beta_0 + \mu_i) + \beta_1_{it} + \beta_2_{it} + \beta_3_{it} + \beta_4_{it} + \beta_5_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

i = Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

t = Waktu (2010 hingga 2016)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_5$  = Koefisien

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto ( juta rupiah)

JPM = Jumlah Penduduk Miskin ( ribu jiwa)

PPBK = Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan ( milyar rupiah)

PPBP = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan ( milyar rupiah)

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka ( persen)

$\varepsilon$  = *Error Term*

### 3.5 Pemilihan Metode Estimasi

Sriyana (2014), ada dua cara pemilihan model terbaik yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis yaitu: Pertama, Uji dengan cara membandingkan antara metode *common effect*, dan *fixed effect* yang disebut dengan *Chow test*. Kedua, Uji Hausman digunakan untuk memilih antara *fixed effect* dengan *random effect*.

### 3.5.1 Uji F (*Chow Test*)

Dalam uji ini, uji signifikan *fixed effect* digunakan dalam memutuskan model manakah yang digunakan. *Chow test* adalah pengujian untuk menentukan model *fixed effect* atau *common effect* dengan asumsi,

Ho : Memilih model *Common Effect*

Ha : Memilih model *Fixed Effect*

$$F \text{ hitung} = \frac{SSR_R - SSR_u/q}{SSR_u/(n - k)}$$

Apabila hasil yang diterima menerima H nol maka model yang layak digunakan untuk estimasi akhir yaitu *Common effect models*, dan model tidak perlu dilanjutkan sampai *Random Effect models*. Sedangkan hasil menunjukkan menolak H nol maka model yang layak digunakan untuk estimasi akhir yaitu *Fixed Effect models* dan dapat dilanjutkan ke *Random Effect models*.

### 3.5.2 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih model *fixed effect* atau model *random effect*. Berikut adalah hipotesis dalam pengujian uji Hausman:

Ho : Memilih model *Random Effect*

Ha : Memilih model *Fixed Effect*

$$M = q \text{ var } (q)^{-1} q$$

Jika nilai statistik hausman probabilitas > alpha (0,05) yang digunakan maka model *random effect* baik untuk digunakan.

### 3.6 Uji Statistik

Uji Statistik dilakukan untuk mengukur ketetapan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinanya ( $R^2$ ), pengujian koefisiensi regresi secara serentak (Uji F), dan pengujian koefisiensi regresi secara individual (Uji t).

#### 3.6.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa baik dalam analisis, yang ditunjukkan oleh nilai  $R^2$  dalam bentuk persentase. Nilai  $R^2$  berkisar antara  $0 < R^2 < 1$ . Semakin besar  $R^2$  menunjukkan semakin baik kualitas dari model tersebut, karena akan dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dan sisanya tidak dijelaskan dalam model. Semakin tinggi nilainya semakin erat pula hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen (Gujarati, 2013).

#### 3.6.2 Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Sriyana (2014), Uji F-statistik merupakan pengujian variabel bebas terhadap variabel terkait secara individual dan uji bersama-sama. Hipotesis untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$$

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Jika nilai probabilitas  $> \alpha$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sebaliknya probabilitas  $< \alpha$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak,

yang berarti secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.6.3 Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t merupakan prosedur dalam menyusun hipotesis statistik, menentukan derajat kesalahan ( $\alpha$ ), menentukan t kritis dan keputusan hipotesis. Uji t dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel lain tetap.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 > 0$$

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 < 0$$

$t_{hitung} < t_{tabel}$  yang berarti gagal menolak  $H_0$  Variabel tidak mempengaruhi

$t_{hitung} > t_{tabel}$  yang berarti Variabel mempengaruhi

$$t = \frac{\beta_1}{Se\beta_1}$$

Penentuan tingkat signifikan  $\alpha$  5% dengan kriteria pengujian : jika nilai probabilitas  $> \alpha$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya jika probabilitas  $< \alpha$   $H_0$  ditolak yang berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. (Sriyana,2014).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menentukan indeks pembangunan manusia dengan variabel dependen indeks pembangunan manusia dalam satuan persen, variabel independen berupa data sekunder yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam juta rupiah, Jumlah Penduduk Miskin dalam ribu jiwa, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dalam milyar rupiah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dalam milyar rupiah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka dalam persen. Penelitian dilakukan di 35 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 hingga 2016. Dalam menganalisis dan mengolah data penelitian menggunakan *E-views 9* dengan menggunakan model regresi data panel. Analisis hasil regresi ini menjelaskan model regresi dan uji sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk model yang terbaik sehingga mampu menjelaskan permasalahan yang hendak dijawab dan sesuai tujuan penelitian.

#### **4.2 Pemilihan Model**

##### **4.5.1 Uji Chow**

Uji Chow digunakan untuk memilih antara model common effect atau fixed effect. Hipotesisnya sebagai berikut:

Ho : Memilih model Common Effect

Ha : Memilih model Fixed Effect

**Tabel 4.1**

**Hasil Uji Chow Test**

Effects Test	d.f.	Prob.
Cross-section F	-34,205	0.0000
Cross-section Chi-square	34	0.0000

*Sumber: Hasil pengolahan dengan eviews 9*

Berdasarkan hasil pengujian uji Chow diperoleh angka probabilitas Cross-section F sebesar 0.0000 yang artinya nilai p value lebih kecil daripada  $\alpha$  5%, sehingga kesimpulan dari uji chow adalah menolak  $H_0$ , sehingga lebih baik menggunakan model *Fixed Effect* daripada *Common effect*.

**4.5.2 Uji Hausman**

Uji Hausman digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara *Random Effect* model dengan *Fixed Effect* model. Dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Memilih model *Random Effect*

$H_a$  : Memilih model *Fixed Effect*

**Tabel 4.2**

**Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5	0.0602

*Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews 9*

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diperoleh nilai statistic uji Hausman memiliki probabilitas 0,0602 lebih kecil dari  $\alpha$  10% maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya metode estimasi yang tepat untuk penelitian yang dilakukan adalah *Fixed Effect* model.

### 4.5.3 Model Regresi Panel Fixed Effect

**Tabel 4.3**

**Hasil Uji *Fixed Effect***

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.93335	1.121261	65.93766	0.0000
PDRB	1.44E-07	2.40E-08	5.990866	0.0000
JPM	-0.05889	0.006310	-9.333347	0.0000
PPBK	3.58E-06	1.24E-06	2.876027	0.0045
PPBP	-5.14E-08	4.05E-07	-0.126904	0.8991
TPT	-0.117262	0.037499	-3.127024	0.0020
Fixed Effect (Cross)				
_CILACAP—C	-3.897425	_KUDUS—C	-7.275597	
_BANYUMAS—C	8.062861	_JEPARA—C	-1.203332	
_PURBALINGGA—C	0.700539	_DEMAK—C	2.909261	
_BANJARNEGARA—C	-2.845786	_SEMARANG--C	-1.553817	
_KEBUMEN—C	4.059503	_TEMANGGUNG--C	-4.782753	
_PURWOREJO—C	0.663375	_KENDAL—C	-1.911967	
_WONOSOBO—C	-0.821880	_BATANG—C	-6.195238	
_MAGELANG—C	-0.833428	_PEKALONGAN--C	-2.669858	
_BOYOLALI—C	1.258149	_PEMALANG--C	0.350641	
_KLATEN—C	6.408435	_TEGAL—C	-3.630140	
_SUKOHARJO—C	1.727516	_BREBES—C	6.288597	
_WONOGIRI—C	-2.107938	_KOTAMAGELANG—C	2.179720	
_KARANGANYAR—C	2.953193	_KOTASURAKARTA—C	5.293410	
_SRAGEN—C	1.200543	_KOTASALATIGA--C	5.835345	
_GROBOGAN—C	2.803036	_KOTASEMARANG—C	-4.180800	
_BLORA—C	-3.229907	_KOTAPEKALONGAN—C	-1.861943	
_REMBANG—C	-0.957632	_KOTATEGAL--C	-1.765695	
_PATI—C	-0.968987			
Effect Specification				
Cross-section fixed (dummy variabls)				
R-squared	0.980374	Mean dependent var	68.68596	
Adjusted R-squared	0.976640	S.D. dependent var	4.804953	
S.E. of regression	0.734384	Akaika info criterion	2.368713	
Sum squared resid	110.5606	Schwarz criterion	2.940347	
Log likelihood	-250.1673	Hannan-Quinn criter.	2.598909	
F-statistic	262.5723	Durbin-Waston stat	0.90739	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Pengolahan data views 9

$$IPM = 73.93335 + 0.000000144PDRB - 0.05889JPM + 0.00000358PPBK - 0.0000000514PPBP - 0.117262TPT + \varepsilon_{it}$$

Dari tabel fixed effect terlihat bahwa nilai koefisien konstanta regresi didapat sebesar 73.93335 yang menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

#### 4.4 Evaluasi Hasil Regresi

##### 4.4.1 Uji Kebaikan Garis Regresi ( $R^2$ )

Berdasarkan dari hasil yang ditunjukkan pada Fixed Effect model dapat diinterpretasikan mengenai besarnya pengaruh dari variabel Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap variabel dependen, sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

**Hasil Koefisien Determinasi**

R square
0.980374

*Sumber: Pengolahan data views 9*

Hasil perhitungan menyatakan bahwa dapat dijelaskan pengaruh variabel independen terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah

yaitu sebesar 0.980374 (98.03%) dan sisanya 1.97% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen pada penelitian yang dilakukan ini.

#### 4.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji f-statistik ini membandingkan probabilitas F dengan nilai  $\alpha$  0,05% maka dapat diketahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 4.5**

Hasil Uji F Probabilitas F
0.000000

*Sumber : Pengolahan data eviws 9*

Hasil perhitungan pada model fixed effect, diperoleh nilai probabilitas F sebesar 0.000000 lebih kecil dari  $\alpha$  5% (  $0.000000 < 0,05$  ), maka dapat dinyatakan variabel Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### 4.4.3 Uji Signifikansi (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen. Dengan membandingkan probabilitas t dengan nilai alpha 0,05 maka dapat diketahui apakah menolak atau menerima hipotesis.

**Tabel 4.6**

**Estimasi Pengujian Hipotesis**

Variabel	Koefisien	Prob	Keterangan
PDRB	1.44E-07	0.0000	Signifikan
JPM	-0.05889	0.0000	Signifikan
PPBK	3.58E-06	0.0045	Signifikan
PPBP	-5.14E-08	0.8991	Tidak Signifikan
TPT	-0.117262	0.0020	Signifikan

*Sumber : Pengolahan data eviews 9*

4.4.4 Intepretasi Hasil

Hasil uji t yang ditunjukkan pada tabel Model fixed effect diatas sebagai berikut :

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto

Hasil perhitungan pada model fixed effect, variabel Produk Domestik Regional Bruto memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpa (  $0.0000 < 0,05$  ), dengan nilai koefisien 0.000000144 maka dapat dinyatakan Produk Domestik Regional Bruto signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Yang berarti ketika terjadi peningkatan PDRB sebesar 1 juta rupiah, maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia. Sehingga semakin meningkatnya nilai PDRB pada suatu wilayah maka akan meningkat juga pertumbuhan ekonominya. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

## 2. Jumlah Penduduk Miskin

Hasil perhitungan pada model fixed effect, variabel Jumlah Penduduk Miskin memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari alfa ( $0.0000 < 0,05$ ), dengan nilai koefisien -0.05889 maka dapat dinyatakan Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh signifikan negative terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Yang berarti ketika jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak seribu juta, maka akan menurunkan indeks pembangunan manusia. Sehingga, ketika semakin meningkatnya Jumlah Penduduk Miskin maka akan semakin meningkatkan pula indeks pembangunan manusia, dan begitujuga sebaliknya, ketika indeks pembangunan manusia meningkat maka jumlah penduduk miskin akan semakin menurun.

## 3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Hasil perhitungan pada model fixed effect, variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0045 lebih kecil dari alfa ( $0.0045 < 0,05$ ), dengan nilai koefisien 0.00000358 maka dapat dinyatakan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. yang berarti, ketika pengeluaran pemerintah bidang kesehatan naik sebesar 1 juta rupiah, maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia.

#### 4. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Hasil perhitungan pada model fixed effect, variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.8991 lebih besar dari alfa (  $0.8991 > 0,05$  ), dengan nilai koefisien -0.0000000514 maka dapat dinyatakan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan tidak signifikan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Sugiarto, dkk (2013). Dalam penelitian tersebut bahwa variable pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan. Dikarenakan besarnya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang angkanya dibawah minimum target yang sudah ditetapkan 20 persen, dan alokasi untuk setiap tahun tidak selalu naik bahkan bisa turun. jadi sampai tahun 2016 pengeluaran pemerintah bidang pendidikan masih belum banyak berpengaruh terhadap peningkatan IPM.

#### 5. Tingkat Pengangguran Terbuka

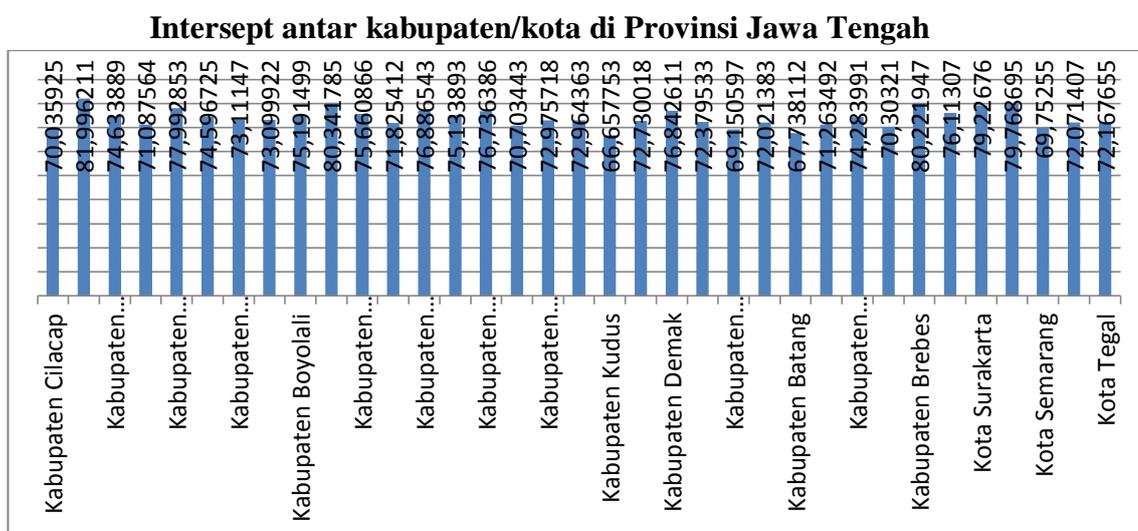
Hasil perhitungan pada model fixed effect, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0020 lebih kecil dari alfa (  $0.0020 < 0,05$  ), dengan nilai koefisien -0.117262 maka dapat dinyatakan tingkat Pengangguran Terbuka signifikan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Yang berarti, ketika tingkat pengangguran terbuka turun sebanyak 1 persen, maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia.

## 4.5 Analisis Ekonomi

### 4.5.1 Analisis Intercept

Berikut dapat dijelaskan analisis dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, mana daerah yang menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi data perhitungan tertinggi dan terendah.

Tabel 4.7



Sumber : Pengolahan data views 9

Dilihat dari sisi wilayahnya Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh yang berbeda-beda pada setiap kabupaten dan kota yang mengakibatkan adanya perbedaan indeks pembangunan manusia antar kabupaten/kota. Dari hasil data pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa Kota Banyumas merupakan kota yang memiliki indeks pembangunan paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan intersep sebesar 81.996211, karena Kabupaten Banyumas kota yang memiliki perencanaan yang bagus dalam meminimalisir kemiskinan dengan meningkatkan indeks pembangunan manusianya, dan dengan adanya BUMDes di beberapa

daerah yang ada di kabupaten Banyumas hal itu lah yang mampu memperbaiki keadaan perekonomian di kabupaten tersebut, dan dilihat dari harapan hidup, kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat yang baik. Sedangkan indeks pembangunan manusia paling rendah adalah Kabupaten Kudus dengan intersep sebesar 66.657753. hal ini terjadi karena kesejahteraan, keamanan, dan kepeduliandi Kabupaten Kudus masih kurang. Hal ini dilihat dari berbagai respon warga kudus yang masih banyak mengeluhkan banjir yang selalu terjadi dijalan raya di Kota Kudus, warga mengatakan bahwa pemerintah kudus tidak mampu meminimalisirkan banjir yang terjadi sehingga masih banyak kota di kabupaten kudus mengalami banjir yang terus meningkat. Dan dari tingkat keamanan pun warga kabupaten kudus banyak yang masih merasa tidak aman, karena di kabupaten kudus tingkat kriminalitas seperti begal masih sering terjadi sehingga banyak warga yang masih mengeluh kepada pemerintah daerah kudus karena ketidaksiapan polisi kudus dalam mengamankan para begal yang masih berkeliaran di kabupaten kudus, yang akan menyebabkan keberanian masyarakat sekitar untuk keluar rumah menjadi merasa takut sehingga akan mengurungkan niat para orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai situasi aman, yang akan menurunkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kudus.

#### **4.5.2 Analisis Hasil**

##### **4.5.2.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

di Provinsi Jawa Tengah, hal ini sesuai dengan dugaan hipotesis awal. Besaran nilai koefisien yang dimiliki variabel PDRB adalah sebesar 0,000000144. Jadi apabila PDRB perkapita naik sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan angka IPM sebesar 0,000000144 persen. Maka dari itu jika jumlah PDRB perkapita semakin ditingkatkan maka angka indeks pembangunan manusia yang diperoleh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar 0,000000144.

#### **4.5.2.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. berdasarkan nilai koefisien yang dimiliki variabel Jumlah Penduduk Miskin adalah sebesar -0,052053. Jadi apabila Jumlah Penduduk Miskin mengalami peningkatan sebesar 1 ribu rupiah maka Indeks Pembangunan Manusia akan turun sebesar 0,05889 persen. Dan sebaliknya jika jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 1 ribu rupiah maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 0,05889.

#### **4.5.2.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. berdasarkan nilai koefisien yang dimiliki variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan adalah sebesar

0,00000358. Jadi apabila Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan naik sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan angka IPM sebesar 0,00000358 persen. Artinya, jika anggaran untuk pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dinaikan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat maka akan menaikkan angka indeks pembangunan manusia yang diperoleh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah meningkat sebesar 0,00000358.

#### **4.5.2.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. berdasarkan nilai koefisien yang dimiliki variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan adalah sebesar - 0.0000000514. Hal ini sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Sugiarto, dkk (2013). Dalam penelitian tersebut bahwa variable pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan. Dikarenakan besarnya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang angkanya dibawah minimum target yang sudah ditetapkan 20 persen, dan alokasi untuk setiap tahun tidak selalu naik bahkan bisa turun. jadi sampai tahun 2016 pengeluaran pemerintah bidang pendidikan masih belum banyak berpengaruh terhadap peningkatan IPM.

#### **4.5.2.5 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. berdasarkan nilai koefisien yang dimiliki variabel Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar  $-0,117262$ . Jadi apabila Tingkat Pengangguran Terbuka turun sebesar 1 persen maka akan meningkatkan IPM sebesar  $0,117262$  persen. Hal ini bisa jadi karena ketika seseorang yang telah lulus sekolah belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau karena memiliki warisan dari orang tua kemudian memutuskan untuk tidak bekerja sementara.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini hasil pengujian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan secara individu terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Ini berarti bahwa ketika Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan maka indeks pembangunan manusia akan meningkat dan begitu sebaliknya, hal ini dikarenakan ketika PDRB meningkat maka akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.
2. Variabel Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negative dan signifikan secara individu terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. hal ini berarti ketika jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan maka indeks pembangunan manusia akan menurun dan sebaliknya, hal ini dikarenakan ketika jumlah penduduk miskin meningkat maka masyarakat akan semakin terpuruk tidak bisa memenuhi kesejahteraannya seperti pendidikan, mendapatkan pekerjaan, kesehatan, dan akan berdampak pada menurunnya indeks pembangunan manusia.
3. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan

manusia di Provinsi Jawa Tengah. Ini berarti bahwa ketika Pengeluaran Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat seperti kebutuhan rumah sakit maka akan membantu mensejahterakan masyarakat, sehingga masyarakat akan selalu sehat dan akan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup.

4. Variabel Pengeluaran pemerintah Bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. hal ini karena beberapa alasan dalam penelitian tersebut bahwa besaran pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan ternyata masih belum bisa membantu meningkatkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia.
5. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negative dan tidak signifikan secara individu terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. ini berarti bahwa ketika pengangguran naik maka indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia karena ketika seseorang tidak bekerja atau sedang menganggur belum tentu seseorang tersebut miskin atau tidak sejahtera ini disebabkan karena faktor lain yaitu missal wrisan dari orang tua, jadi ketika mereka masih menganggur tetapi merekaa masih bisa memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup.

## **5.2 Implikasi**

Dari penelitian ini telah diketahui variabel apa saja yang tidak signifikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Berikut variabel yang tidak signifikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah:

Pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di suatu wilayah, ketika pendidikan di wilayah tersebut masih belum mampu berjalan dengan baik maka tidak akan mampu menaikkan kualitas indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah Daerah pada Sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal pendidikan ekonomi dan bisnis* vol. 1 no. 1, 77-102.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, (2017), “ Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah 2017, dari <http://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik (2017), Indeks Pembangunan Manusia, diambil 14 November 2017, Dari: <http://www.jateng.bps.go.id>
- Chalid, N. & Y, Yusuf (2014), “ Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau”, *Jurnal Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*, *Jurnal Ekonomi*, Volume 22, No.2, Hal 1-12.
- Dewi, N. (2017), “Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 4, No.1, Hal 870-882.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diambil dari : [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page\\_id=316](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=316).
- Ezkirianto, R. (2013, 12 18)  
<http://repository.ipd.ac.id/bitstream/handle/123456789/64485/H13rez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. retrived from <http://repository.ipd.ac.id>:  
<http://repository.ipb.ac.id>
- Gujarati, ddk (2013), *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 1 Edisi Ke 5*”, Salemba Empat, Jakarta.
- Ibrahim (2017), Empat Tahun terakhir Pertumbuhan Perekonomian Jateng Lampau Nasional. Diambil dari:  
<https://m.merdeka.com/jateng/ukm/empat-tahun-terakhir-pertumbuhan-perekonomian-jateng-lampau-nasional-170810x.html>
- Jefri. Septian, dkk (2015), “ Pengaruh PDRB, Belanja Modal dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (studi kasus: Eks Karesiden Besuki), *Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Jember*.

- Karlina Sintia.D. (2018), Hanya diSekolah ini Biaya Pendidikan diBayar Dengan Hasil Bumi. Diambil dari :  
<https://www.liputan6.com/news/read/3585454/hanya-di-sekolah-ini-biaya-pendaftaran-dibayar-dengan-hasil-bumi>
- Kuncoro, M. (2010), “Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan”, UPP STIM YKPN YKPN, Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno.(1993), Ekonomi Publik. BPFE, Yogyakarta.
- Puthut Dwi.P.N (2018), Seorang Pemuda Tewas dikeroyok di depan Balai Desa Motornya diceburkan ke sungai. Diambil dari :  
<https://regional.kompas.com/read/2018/06/26/07432801//seorang-pemuda-tewas-dikeroyok-di-depan-balai-desa-motornya-diceburkan-ke>
- Santoso, S A., Hamzah, A., & Syechalad, M. N. (2013). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi, 76-88.
- Septiana. M, Vekie. A, & Hanly F. (2015), “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara”, Jurnal, Vol. 15, NO. 2, 7 (15)
- Sugiarto A, dkk. (2013), “ Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh”. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 1, No 4, Hal 76-88.
- Sumarsono, Sonny (2009). “ Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia”. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sjafrizal (2012), Ekonomi Wilayah dan Perkotaan Pers, Jakarta
- Sriyana, J. (2014), “Metode Regresi Data Panel”, Ekonisia, Yogyakarta.
- Sukirno, S. (2010), “Makro Ekonomi Teori Pengantar”, Rajawali Pers, Jakarta
- Sukirno, S. (2004), Makro Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M.P & Smith, S.C. (2006), “Pembangunan Ekonomi Edisi Sembilan Jilid 1, Erlangga, Jakarta.
- Widarjono, A. (2013), “Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya: Disertai

Panduan Eviews”, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

World Bank. (2004), “Defini Kemiskinan”, dari <http://www.worldbank.org>. diakses pada 5 januari 2018.



## DATA LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### Data IPM Tahun 2010-2016 (Persen)

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Cilacap	64.18	64.73	65.72	66.8	67.25	67.77	68.6
Kabupaten Banyumas	66.87	67.45	68.06	68.55	69.25	69.89	70.49
Kabupaten Purbalingga	63.61	64.33	64.94	65.53	66.23	67.03	67.48
Kabupaten Banjarnegara	60.7	61.58	62.29	62.84	63.15	64.73	65.52
Kabupaten Kebumen	63.08	64.05	64.47	64.86	65.67	66.87	67.41
Kabupaten Purworejo	68.16	69.11	69.4	69.77	70.12	70.37	70.66
Kabupaten Wonosobo	62.5	63.07	64.18	64.57	65.2	65.7	66.19
Kabupaten Magelang	63.28	64.16	64.75	65.86	66.35	67.13	67.85
Kabupaten Boyolali	68.76	69.14	69.51	69.81	70.34	71.74	72.18
Kabupaten Klaten	70.76	71.16	71.71	72.42	73.19	73.81	73.97
Kabupaten Sukoharjo	71.53	72.34	72.81	73.22	73.76	74.53	75.06
Kabupaten Wonogiri	63.9	64.75	65.75	66.4	66.77	67.76	68.23
Kabupaten Karanganyar	70.31	71	72.26	73.33	73.89	74.26	74.9
Kabupaten Sragen	67.67	68.12	68.91	69.95	70.52	71.1	71.43
Kabupaten Grobogan	64.56	65.41	66.39	67.43	67.77	68.05	68.52
Kabupaten Blora	63.02	63.88	64.7	65.37	65.84	66.22	66.61
Kabupaten Rembang	64.53	65.36	66.03	66.84	67.4	68.18	68.6
Kabupaten Pati	65.13	65.71	66.13	66.47	66.99	68.51	69.03
Kabupaten Kudus	69.22	69.89	70.57	71.58	72	72.72	72.94
Kabupaten Jepara	66.76	67.63	68.45	69.11	69.61	70.02	70.25
Kabupaten Demak	66.02	66.84	67.55	68.38	68.95	69.75	70.1
Kabupaten Semarang	69.58	70.35	70.88	71.29	71.65	71.89	72.4
Kabupaten Temanggung	63.08	64.14	64.91	65.52	65.97	67.07	67.6
Kabupaten Kendal	66.23	66.96	67.55	67.98	68.46	69.57	70.11
Kabupaten Batang	61.64	62.59	63.09	63.6	64.07	65.46	66.38
Kabupaten Pekalongan	63.75	64.72	65.33	66.26	66.98	67.4	67.71
Kabupaten Pemasang	58.64	59.66	60.78	61.81	62.35	63.7	64.17
Kabupaten Tegal	61.14	61.97	62.67	63.5	64.1	65.04	65.84
Kabupaten Brebes	59.49	60.51	60.92	61.87	62.55	63.18	63.98
Kota Magelang	73.99	74.47	75	75.29	75.79	76.39	77.16
Kota Surakarta	77.45	78	78.44	78.89	79.34	80.14	80.76
Kota Salatiga	78.35	78.76	79.1	79.37	79.98	80.96	81.14
Kota Semarang	76.96	77.58	78.04	78.68	79.24	80.23	81.19
Kota Pekalongan	68.95	69.54	69.95	70.82	71.53	72.69	73.32
Kota Tegal	69.33	70.03	70.68	71.44	72.2	72.96	73.55

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

## LAMPIRAN II

### Data PDRB atas dasar harga konstan 2010 (juta rupiah) Tahun 2010-2016

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cilacap	75,099,089.89	78,156,818.82	79,702,237.61	81,022,670.26	83,391,500.18	88,347,606.68	92,820,362.20
Banyumas	23,016,943.39	24,538,595.63	25,982,158.22	27,793,138.47	29,367,687.40	31,164,876.40	33,051,046.65
Purbalingga	10,858,631.52	11,474,221.22	12,138,445.34	12,778,311.23	13,397,712.78	14,125,812.26	14,796,924.63
Banjarnegara	9,439,359.00	9,952,403.66	10,473,363.43	11,043,083.01	11,629,845.85	12,266,046.35	12,929,657.38
Kebumen	12,311,421.83	13,068,985.50	13,707,057.24	14,333,333.50	15,163,091.84	16,115,554.01	16,916,219.56
Purworejo	8,513,490.56	8,993,814.30	9,406,242.93	9,870,969.95	10,312,937.79	10,866,645.98	11,426,355.14
Wonosobo	9,005,925.54	9,489,550.46	9,935,905.32	10,333,757.05	10,828,168.68	11,353,869.94	11,949,926.14
Magelang	14,363,230.57	15,323,039.48	16,071,142.55	17,020,755.61	17,936,288.38	18,838,351.97	19,855,844.24
Boyolali	13,721,701.47	14,592,026.26	15,369,974.36	16,266,498.68	17,148,350.76	18,160,983.95	19,118,756.30
Klaten	17,002,049.66	18,071,350.51	19,102,402.71	20,241,429.01	21,424,522.36	22,558,976.15	23,717,931.02
Sukoharjo	16,357,221.65	17,319,638.62	18,342,247.26	19,401,889.44	20,449,009.84	21,612,078.19	22,836,644.07
Wonogiri	13,310,571.10	13,786,711.34	14,605,088.22	15,303,280.47	16,107,795.17	16,977,198.56	17,862,651.97
Karanganyar	16,393,788.72	17,205,063.88	18,219,456.66	19,256,516.28	20,262,444.42	21,286,287.14	22,428,803.80
Sragen	15,832,557.66	16,870,231.27	17,902,104.86	19,102,181.74	20,169,824.79	21,390,871.20	22,614,621.66
Grobogan	12,766,021.74	13,172,711.96	13,842,047.14	14,474,728.93	15,064,456.66	15,962,619.43	16,674,629.70
Blora	10,149,079.63	10,597,723.01	11,116,865.90	11,712,504.85	12,227,201.29	12,882,587.70	15,913,432.03
Rembang	8,373,546.87	8,808,302.78	9,277,163.23	9,780,750.39	10,284,274.36	10,850,269.20	11,418,008.73
Pati	18,782,546.64	19,893,325.24	21,072,328.70	22,329,693.98	23,365,213.99	24,752,325.07	26,039,955.34
Kudus	52,933,496.31	55,175,794.89	57,440,810.51	59,944,556.52	62,600,680.87	65,041,047.55	66,688,490.99
Jepara	13,347,321.26	14,004,325.03	14,824,995.87	15,623,738.87	16,374,715.21	17,200,365.92	18,063,134.88
Demak	11,647,735.65	12,275,702.69	12,823,227.04	13,499,226.47	14,078,419.80	14,913,837.51	15,665,204.77
Semarang	21,572,136.87	22,925,456.80	24,306,718.35	25,758,121.08	27,264,112.96	28,769,677.95	30,286,380.79
Temanggung	9,710,199.27	10,301,569.79	10,740,983.02	11,299,342.97	11,867,679.59	12,486,494.54	13,110,795.64
Kendal	18,798,278.37	20,032,434.32	21,075,717.33	22,386,123.50	23,536,834.39	24,771,543.49	26,159,087.07
Batang	9,447,328.38	10,025,044.65	10,488,456.63	11,104,696.78	11,693,897.06	12,327,739.23	12,935,491.09
Pekalongan	10,254,315.35	10,834,201.09	11,354,849.90	12,034,805.89	12,630,368.82	13,234,564.04	13,917,701.83
Pemalang	11,282,196.10	11,847,199.06	12,477,235.25	13,172,063.61	13,898,669.42	14,673,696.23	15,463,800.55
Tegal	15,106,509.91	16,071,820.41	16,912,249.74	18,050,291.97	18,958,841.04	19,992,675.45	21,265,717.23
Brebes	20,158,107.77	21,498,422.48	22,482,262.67	23,812,056.92	25,074,171.51	26,572,834.89	27,867,371.33
Kota Magelang	4,010,718.18	4,255,662.21	4,484,268.08	4,755,092.20	4,992,112.82	5,247,341.27	5,518,684.53
Kota Surakarta	21,469,551.30	22,848,439.42	24,123,781.59	25,631,681.32	26,984,358.61	28,453,493.87	29,966,373.01
Kota Salatiga	5,845,475.81	6,230,219.49	6,574,907.26	6,989,045.50	7,378,042.82	7,759,181.62	8,164,810.21
Kota Semarang	80,824,099.97	86,142,966.70	91,282,029.07	96,985,402.04	103,109,874.91	109,088,689.61	115,298,166.86
Kota Pekalongan	4,624,260.08	4,878,332.22	5,151,813.52	5,456,196.88	5,755,282.26	6,043,095.73	6,367,272.96
Kota Tegal	6,895,713.33	7,341,540.16	7,650,479.56	8,084,175.73	8,491,325.37	8,953,879.56	9,442,940.97

*Sumber : Badan Pusat Statistik, (BPS)*

### LAMPIRAN III

#### Data Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Tahun 2010-2016

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Cilacap	297.2	282	260.9	255.7	239.8	243.5	240.2
Kabupaten Banyumas	314.1	328.5	303.9	296.8	283.5	285.9	283.9
Kabupaten Purbalingga	208.9	196	181.3	181.1	176	176.5	171.8
Kabupaten Banjarnegara	166.7	177.3	164	166.8	159.5	165.4	158.2
Kabupaten Kebumen	263	279.4	258.5	251.1	242.3	241.9	235.9
Kabupaten Purworejo	115.3	121.9	112.8	109	102.1	101.2	99.1
Kabupaten Wonosobo	174.7	183	169.3	170.1	165.8	166.4	160.1
Kabupaten Magelang	167.2	179.6	166.2	171	160.5	162.4	158.9
Kabupaten Boyolali	127.8	139.5	129.1	126.5	118.6	120	117
Kabupaten Klaten	197.4	203.1	187.9	179.5	168.2	172.3	168
Kabupaten Sukoharjo	90.2	92	85.1	84.1	78.9	79.9	78.9
Kabupaten Wonogiri	145.5	146.4	135.4	132.2	123.8	123	124.8
Kabupaten Karanganyar	113.8	124.5	115.2	114.4	107.3	106.4	107.7
Kabupaten Sragen	149.7	154.3	142.8	139	130.3	130.4	126.8
Kabupaten Grobogan	233.7	227.8	210.8	199	186.5	184.5	184.1
Kabupaten Blora	134.9	134.9	124.8	123.8	116	115	113.9
Kabupaten Rembang	138.5	140.4	129.9	128	120	119.1	115.5
Kabupaten Pati	172.4	175.1	162	157.9	148.1	147.1	144.2
Kabupaten Kudus	70.2	73.6	68.1	70.1	65.8	64.1	64.2
Kabupaten Jepara	111.8	113.3	104.8	106.9	100.5	100.6	100.3
Kabupaten Demak	198.8	192.5	178.1	172.5	162	160.9	158.8
Kabupaten Semarang	97.9	96	88.8	83.2	79.8	81.2	80.7
Kabupaten Temanggung	95.3	94.9	87.8	91.1	85.5	87.5	87.1
Kabupaten Kendal	130.4	128.6	119	117.7	110.5	109.3	107.8
Kabupaten Batang	103.6	95.3	88.2	87.5	82.1	83.5	82.6
Kabupaten Pekalongan	136.6	125.9	116.5	116.5	109.3	112.1	113.3
Kabupaten Pemasang	251.8	261.2	241.7	246.8	237	235.5	227.1
Kabupaten Tegal	182.5	161.1	149	149.8	140.3	143.5	144.2
Kabupaten Brebes	398.7	394.4	364.9	367.9	355.1	352	348
Kota Magelang	12.4	13.1	12.1	11.8	11	10.9	10.6
Kota Surakarta	69.8	64.5	59.7	59.7	55.9	55.7	55.9
Kota Salatiga	14.2	13.3	12.3	11.5	10.8	10.6	9.7
Kota Semarang	79.7	88.5	81.9	86.7	84.7	84.3	83.6
Kota Pekalongan	26.4	28.3	26.8	24.1	23.6	24.1	23.6
Kota Tegal	25.7	25.9	24	21.6	20.9	20.3	20.3

*Sumber : Badan Pusat Statistik, (BPS)*

## LAMPIRAN IV

### Data pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan(milyar rupiah)Tahun 2010-2016

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Cilacap	113792	169416	165934	196344	231818	278762	446652
Kab. Banyumas	149771	193369	232583	260552	338849	434345	468405
Kab. Purbalingga	88990	115564	127327	139488	185003	197794	304091
Kab. Banjarnegara	92905	100037	119001	139571	155994	103829	399150
Kab. Kebumen	96944	109605	131090	205949	253124	252254	112299
Kab. Purworejo	87352	103549	118351	147094	162619	215616	296122
Kab. Wonosobo	71432	89959	102077	115208	162384	213877	195214
Kab. Magelang	99006	110150	126472	142334	152856	199964	266797
Kab. Boyolali	109229	124546	166688	185871	222640	245774	66837
kab. Klaten	67150	76321	81293	88244	170920	208622	240506
Kab. Sukoharjo	86192	98241	106921	131790	167812	248961	159643
Kab. Wonogiri	97736	101139	120447	135094	189778	206755	79205
Kab. Karanganyar	72532	84510	98490	127500	160924	183227	78837
Kab. Sragen	99870	117746	149423	153946	210480	242149	334887
Kab. Grobogan	88211	109203	145913	149673	222868	243103	345572
Kab. Blora	74937	92511	124462	137788	191271	194379	295686
Kab. Rembang	88849	105620	136168	156836	176882	197737	71015
Kab. Pati	153943	173488	213382	229752	254197	317438	421024
Kab. Kudus	124154	137906	158982	183737	194342	324473	372620
Kab. Jepara	95937	121076	145707	169360	178562	242143	283753
Kab. Demak	74845	89082	106532	115557	130198	167826	268262
Kab. Semarang	116956	123655	146350	188348	229090	247573	335197
Kab. Temanggung	77477	83959	89220	110059	135770	191437	19611
Kab. Kendal	89732	116872	120289	146791	180360	204138	311773
Kab. Batang	73089	88247	102442	133116	155589	124854	233344
Kab. Pekalongan	109134	120361	153245	190573	221554	256660	241782
Kab. Pemasang	96084	95501	129107	150780	157204	236718	297122
Kab. Tegal	107528	122417	152198	180171	257311	310785	17795
Kab. Brebes	149060	133684	149390	206765	231707	369044	487971
Kota Magelang	66887	50448	97255	112916	133562	168579	77638
Kota Surakarta	66204	108139	118581	121791	124125	129886	156395
Kota Salatiga	71132	75195	111016	95959	127348	125659	231671
Kota Semarang	148490	158390	70929	250660	266876	313011	528567
Kota Pekalongan	40896	58842	66843	83442	109913	162398	81384
Kota Tegal	80784	104071	133651	157349	179797	233683	278946

Sumber : LGF anggaran jateng

## LAMPIRAN V

### Data pengeluaran pemerintah bidang pendidikan(milyar rupiah) Tahun 2010-2016

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Cilacap	507961	615547	796468	920165	965176	1154494	1102472
Kab. Banyumas	552467	841648	909646	1082757	1180851	1301989	1420944
Kab. Purbalingga	344245	495613	597521	548938	606590	716770	635052
Kab. Banjarnegara	342873	585090	602532	642649	693655	96763	1416880
Kab. Kebumen	496844	707765	723605	829733	913819	1055030	167359
Kab. Purworejo	408723	548451	610358	616215	688027	773151	684773
Kab. Wonosobo	259715	434066	472793	502523	553594	651591	585811
Kab. Magelang	438254	647635	791133	863392	953023	994300	735547
Kab. Boyolali	488243	624410	600108	678845	758389	854682	180409
kab. Klaten	591939	834955	882665	933642	1039412	1117038	1011690
Kab. Sukoharjo	377256	515132	552034	614904	689250	853931	724286
Kab. Wonogiri	485169	679429	761471	866099	845674	939009	617340
Kab. Karanganyar	375172	502938	601620	742864	869111	881126	129135
Kab. Sragen	401946	583058	672156	751932	768480	888130	762821
Kab. Grobogan	343770	639148	635214	797204	734020	813048	729528
Kab. Blora	345969	562543	603878	661423	735884	839824	698827
Kab. Rembang	252264	356466	477211	508186	572505	619034	123614
Kaab. Pati	477099	577163	705089	829073	828585	907399	855367
Kab. Kudus	326738	390587	476942	558526	650031	703352	646897
Kab. Jepara	321981	468139	586335	608710	644918	770962	466949
Kab. Demak	287372	496987	556295	581571	629535	704773	613340
Kab. Semarang	341913	437773	460943	445721	452094	692426	686210
Kab. Temanggung	277277	334887	430768	452341	494303	563820	17349
Kab. Kendal	340363	504170	561553	649990	681716	760449	695793
Kab. Batang	251113	372039	470784	457051	448688	68462	505999
Kab. Pekalongan	325067	459797	535831	580538	595001	655371	554303
Kab. Pemasang	414030	540925	700241	774827	735148	908871	815911
Kab. Tegal	411617	624292	642077	681321	756365	941223	112839
Kab. Brebes	542642	750916	783166	930998	913057	1028375	914141
Kota Magelang	142707	34215	207933	224974	253698	272227	44693
Kota Surakarta	284538	487615	535444	546251	651021	731421	666857
Kota Salatiga	118919	177438	198132	245797	272478	304519	217151
Kota Semarang	542728	667638	637581	1044601	861445	1049927	1068293
Kota Pekalongan	496	169353	202842	3827	240065	276602	243238
Kota Tegal	128591	163593	224961	251275	214066	337139	304702

*Sumber : LGF anggaran Jateng*

## LAMPIRAN VI

### DATA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA(persen) Tahun 2010-2016

kabupaten/kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Cilacap	9.75	10.82	7.29	6.68	5.65	8.01	8.01
Kabupaten Banyumas	7.37	6.61	5.11	5.45	5.37	6.37	6.37
Kabupaten Purbalingga	3.82	5.1	5.02	5.63	5.13	4.84	4.84
Kabupaten Banjarnegara	3.1	4.97	3.69	4.16	4.06	5.05	5.05
Kabupaten Kebumen	8.02	4.73	3.58	3.52	3.25	4.14	4.14
Kabupaten Purworejo	3.4	5.3	3.2	5.15	5.1	4.01	4.01
Kabupaten Wonosobo	4.04	4.92	5.21	5.82	5.34	4.47	4.47
Kabupaten Magelang	2.97	6.83	4.38	6.13	7.45	5.16	5.16
Kabupaten Boyolali	3.9	5.81	4.43	5.44	4.95	2.03	2.03
Kabupaten Klaten	4.5	7.63	3.7	5.34	4.75	2.51	2.51
Kabupaten Sukoharjo	7.4	6.27	6.1	5.98	4.6	4.52	4.52
Kabupaten Wonogiri	4.7	3.82	3.46	3.61	3.45	3.07	3.07
Kabupaten Karanganyar	6.62	5.78	5.82	3.84	3.54	3.6	3.60
Kabupaten Sragen	4.09	8.43	5.88	5.63	6.04	4.51	4.51
Kabupaten Grobogan	4.6	5.33	4.2	6.1	4.25	5.22	5.22
Kabupaten Blora	5.49	6.9	4.75	6.23	4.3	4.68	4.68
Kabupaten Rembang	4.89	7.22	5.75	5.97	5.23	4.51	4.51
Kabupaten Pati	6.22	11.17	11.98	7.29	6.37	4.43	4.43
Kabupaten Kudus	6.22	8.32	5.89	8.07	5.03	5.04	5.04
Kabupaten Jepara	4.56	5.48	4.29	6.34	5.09	3.12	3.12
Kabupaten Demak	5.69	5.03	8.4	7.08	5.17	6.02	6.02
Kabupaten Semarang	6.25	6.16	4.87	3.9	4.38	2.57	2.57
Kabupaten Temanggung	3.6	3.54	3.39	4.87	3.19	1.5	1.50
Kabupaten Kendal	5.57	6.54	6.31	6.43	6.15	7.07	7.07
Kabupaten Batang	6.48	6.66	5.88	7.02	7.42	4.56	4.56
Kabupaten Pekalongan	4.04	6.91	5.08	4.78	6.03	5.1	5.10
Kabupaten Pemasang	11.45	7.37	4.85	6.48	7.44	6.53	6.53
Kabupaten Tegal	7.48	10.59	6.12	6.89	8.47	9.52	9.52
Kabupaten Brebes	8.21	11.08	8.22	9.61	9.53	6.49	6.49
Kota Magelang	13.28	11.51	8.99	6.75	7.38	6.43	6.43
Kota Surakarta	8.73	7.7	6.29	7.22	6.16	4.53	4.53
Kota Salatiga	10.22	9.02	6.84	6.21	4.46	6.43	6.43
Kota Semarang	8.98	7.65	6.01	6.02	7.76	5.77	5.77
Kota Pekalongan	7	8.06	7.67	5.28	5.42	4.1	4.10
Kota Tegal	14.22	9.77	8.75	9.32	9.2	8.06	8.06

*Sumber; Badan Pusat Statistik (BPS)*

## LAMPIRAN VII

**Tabel *Common Effect***

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/14/18 Time: 02:41				
Sample: 2010 2016				
Periods included: 7				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 245				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	70.80088	0.867309	81.63277	0.0000
X1	6.80E-08	1.21E-08	5.625199	0.0000
X2	-0.046903	0.003214	-14.59338	0.0000
X3	1.06E-06	3.42E-06	0.309722	0.7570
X4	3.82E-06	1.32E-06	2.889966	0.0042
X5	0.086828	0.107347	0.808855	0.4194
R-squared	0.548132	Mean dependent var		68.68596
Adjusted R-squared	0.538679	S.D. dependent var		4.804953
S.E. of regression	3.263555	Akaike info criterion		5.227696
Sum squared resid	2545.539	Schwarz criterion		5.313441
Log likelihood	-634.3928	Hannan-Quinn criter.		5.262226
F-statistic	57.98309	Durbin-Watson stat		0.079775
Prob(F-statistic)	0.000000			

*Sumber : Pengolahan data evIEWS 9*

## LAMPIRAN VIII

**Tabel *Fixed Effect***

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.93335	1.121261	65.93766	0.0000
X1	1.44E-07	2.40E-08	5.990866	0.0000
X2	-0.05889	0.006310	-9.333347	0.0000
X3	3.58E-06	1.24E-06	2.876027	0.0045
X4	-5.14E-08	4.05E-07	-0.126904	0.8991
X5	-0.117262	0.037499	-3.127024	0.0020
Fixed Effect (Cross)				
_CILACAP—C	-3.897425	_KUDUS—C	-7.275597	
_BANYUMAS—C	8.062861	_JEPARA—C	-1.203332	
_PURBALINGGA—C	0.700539	_DEMAK—C	2.909261	
_BANJARNEGARA—C	-2.845786	_SEMARANG--C	-1.553817	
_KEBUMEN—C	4.059503	_TEMANGGUNG--C	-4.782753	
_PURWOREJO—C	0.663375	_KENDAL--C	-1.911967	
_WONOSOBO—C	-0.821880	_BATANG--C	-6.195238	
_MAGELANG—C	-0.833428	_PEKALONGAN--C	-2.669858	
_BOYOLALI—C	1.258149	_PEMALANG--C	0.350641	
_KLATEN—C	6.408435	_TEGAL—C	-3.630140	
_SUKOHARJO—C	1.727516	_BREBES--C	6.288597	
_WONOGIRI—C	-2.107938	_KOTAMAGELANG—C	2.179720	
_KARANGANYAR—C	2.953193	_KOTASURAKARTA—C	5.293410	
_SRAGEN—C	1.200543	_KOTASALATIGA--C	5.835345	
_GROBOGAN—C	2.803036	_KOTASEMARANG—C	-4.180800	
_BLORA—C	-3.229907	_KOTAPEKALONGAN—C	-1.861943	
_REMBANG—C	-0.957632	_KOTATEGAL--C	-1.765695	
_PATI—C	-0.968987			
Effect Specification				
Cross-section fixed (dummy variabls)				
R-squared	0.980374	Mean dependent var	68.68596	
Adjusted R-squared	0.976640	S.D. dependent var	4.804953	
S.E. of regression	0.734384	Akaika info criterion	2.368713	
Sum squared resid	110.5606	Schwarz criterion	2.940347	
Log likelihood	-250.1673	Hannan-Quinn criter.	2.598909	
F-statistic	262.5723	Durbin-Waston stat	0.90739	
Prob(F-statistic)	0.000000			

*Sumber: Pengolahan data views 9*

## LAMPIRAN IX

### Tabel *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.26864	0.981890	74.62000	0.0000
X1	1.23E-07	1.85E-08	6.623268	0.0000
X2	-0.052053	0.004612	-11.28630	0.0000
X3	4.53E-06	1.17E-06	3.885126	0.0001
X4	6.29E-08	4.00E-07	0.157105	0.8753
X5	-0.127870	0.036923	-3.463213	0.0006
Random Effects (Cross)				
_CILACAP—C	-3.469643	_KUDUS—C		-5.964118
_BANYUMAS—C	6.881997	_JEPARA—C		-1.104119
_PURBALINGGA—C	0.202840	_DEMAK—C		2.520409
_BANJARNEGARA—C	-3.231182	_SEMARANG--C		-1.127844
_KEBUMEN—C	3.087717	_TEMANGGUNG--C		-4.565306
_PURWOREJO—C	0.610792	_KENDAL--C		-1.724891
_WONOSOBO—C	-1.223840	_BATANG--C		-5.961921
_MAGELANG—C	-1.118964	_PEKALONGAN--C		-2.722389
_BOYOLALI—C	1.223853	_PEMALANG--C		-0.523411
_KLATEN—C	6.027694	_TEGAL—C		-3.738083
_SUKOHARJO—C	2.066770	_BREBES--C		4.664226
_WONOGIRI—C	-2.184230	_KOTAMAGELANG—C		2.821322
_KARANGANYAR—C	3.105633	_KOTASURAKARTA—C		5.938658
_SRAGEN—C	1.113327	_KOTASALATIGA--C		6.457305
_GROBOGAN—C	2.165744	_KOTASEMARANG—C		-2.273246
_BLORA—C	-3.296987	_KOTAPEKALONGAN—C		-1.282823
_REMBANG—C	-1.064956	_KOTATEGAL--C		-1.159272
_PATI—C	-1.151061			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			3.280447	0.9523
Idiosyncratic random			0.734384	0.0477
Weighted Statistics				
R-squared	0.725612	Mean dependent var		5.791085
Adjusted R-squared	0.719871	S.D. dependent var		1.403658
S.E. of regression	0.742917	Sum squared resid		131.9101
F-statistic	126.4058	Durbin-Watson stat		0.766338
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.477755	Mean dependent var		68.68596
Sum squared resid	2941.998	Durbin-Watson stat		0.034360

*Sumber : Pengolahan data views 9*

## LAMPIRAN X

### Tabel Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: Untitled				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test		Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F		132.791379	(34,205)	0.0000
Cross-section Chi-square		768.450921	34	0.0000
Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/14/18 Time: 02:50				
Sample: 2010 2016				
Periods included: 7				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 245				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	70.80088	0.867309	81.63277	0.0000
X1	6.80E-08	1.21E-08	5.625199	0.0000
X2	-0.046903	0.003214	-14.59338	0.0000
X3	1.06E-06	3.42E-06	0.309722	0.7570
X4	3.82E-06	1.32E-06	2.889966	0.0042
X5	0.086828	0.107347	0.808855	0.4194
R-squared	0.548132	Mean dependent var		68.68596
Adjusted R-squared	0.538679	S.D. dependent var		4.804953
S.E. of regression	3.263555	Akaike info criterion		5.227696
Sum squared resid	2545.539	Schwarz criterion		5.313441
Log likelihood	-634.3928	Hannan-Quinn criter.		5.262226
F-statistic	57.98309	Durbin-Watson stat		0.079775
Prob(F-statistic)	0.000000			

*Sumber : Pengolahan data views 9*

## LAMPIRAN XI

### Tabel Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: Untitled				
Test cross-section random effects				
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random		10.585997	5	0.0602
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.000000	0.000000	0.000000	0.1659
X2	-0.058890	-0.052053	0.000019	0.1123
X3	0.000004	0.000005	0.000000	0.0282
X4	-0.000000	0.000000	0.000000	0.0789
X5	-0.117262	-0.127870	0.000043	0.1054
Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/14/18 Time: 02:54				
Sample: 2010 2016				
Periods included: 7				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 245				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.93335	1.121261	65.93766	0.0000
X1	1.44E-07	2.40E-08	5.990866	0.0000
X2	-0.058890	0.006310	-9.333347	0.0000
X3	3.58E-06	1.24E-06	2.876027	0.0045
X4	-5.14E-08	4.05E-07	-0.126904	0.8991
X5	-0.117262	0.037499	-3.127024	0.0020
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.980374	Mean dependent var	68.68596	
Adjusted R-squared	0.976640	S.D. dependent var	4.804953	
S.E. of regression	0.734384	Akaike info criterion	2.368713	
Sum squared resid	110.5606	Schwarz criterion	2.940347	
Log likelihood	-250.1673	Hannan-Quinn criter.	2.598909	
F-statistic	262.5723	Durbin-Watson stat	0.907390	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Pengolahan Data Eviews 9

## LAMPIRAN XII

### Data Intercept per Kabupaten/kota

Wilayah	C	Koefisien
Kabupaten Cilacap	73.93335	70.035925
Kabupaten Banyumas	73.93335	81.996211
Kabupaten Purbalingga	73.93335	74.633889
Kabupaten Banjarnegara	73.93335	71.087564
Kabupaten Kebumen	73.93335	77.992853
Kabupaten Purworejo	73.93335	74.596725
Kabupaten Wonosobo	73.93335	73.11147
Kabupaten Magelang	73.93335	73.099922
Kabupaten Boyolali	73.93335	75.191499
Kabupaten Klaten	73.93335	80.341785
Kabupaten Sukoharjo	73.93335	75.660866
Kabupaten Wonogiri	73.93335	71.825412
Kabupaten Karanganyar	73.93335	76.886543
Kabupaten Sragen	73.93335	75.133893
Kabupaten Grobogan	73.93335	76.736386
Kabupaten Blora	73.93335	70.703443
Kabupaten Rembang	73.93335	72.975718
Kabupaten Pati	73.93335	72.964363
Kabupaten Kudus	73.93335	66.657753
Kabupaten Jepara	73.93335	72.730018
Kabupaten Demak	73.93335	76.842611
Kabupaten Semarang	73.93335	72.379533
Kabupaten Temanggung	73.93335	69.150597
Kabupaten Kendal	73.93335	72.021383
Kabupaten Batang	73.93335	67.738112
Kabupaten Pekalongan	73.93335	71.263492
Kabupaten Pemalang	73.93335	74.283991
Kabupaten Tegal	73.93335	70.30321
Kabupaten Brebes	73.93335	80.221947
Kota Magelang	73.93335	76.11307
Kota Surakarta	73.93335	79.22676
Kota Salatiga	73.93335	79.768695
Kota Semarang	73.93335	69.75255
Kota Pekalongan	73.93335	72.071407
Kota Tegal	73.93335	72.167655

Sumber : Pengolahan data views 9